

## KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK

==== Oleh : Gito Supriadi\* ====

### ABSTRAK

Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur dan stabil, sehingga masyarakat pun merupakan kesatuan yang dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama. Gejala-gejala yang sama dimaksud adalah adanya perubahan sosial yang nantinya mengarah kepada ketidaksamaan sosial. Ketidaksamaan sosial berkenaan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau prestise sosial antar individu dalam suatu masyarakat yang dinamakan juga sebagai pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Munculnya pelapisan masyarakat tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik-konflik sosial. Konflik sosial tersebut muncul disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya ialah prasangka yaitu merasa curiga dan memberikan gambaran negatif terhadap kelompok yang lainnya, fanatisme pada kelompok yaitu menimbulkan perasaan superior dan memandang kelompok lain lebih rendah, dan primordialisme atau keterikatan kelompok etnis pada etnisnya sendiri saja sehingga menyebabkan kelompok etnis tersebut mengabaikan kelompok etnis lainnya.

*Kata Kunci : Konflik, Sosial Masyarakat*

#### A. Pendahuluan

Mudzhar, dalam Isre (ed. 2003:1) menyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi dan informasi telah membuat dunia ini bagaikan sebuah kampung besar yang oleh sebagian sosiolog disebut sebagai *the global village* (kampung dunia). Sebagai salah satu akibatnya sudut-sudut pemukiman

manusia di dunia juga semakin pluralistik, baik dari segi ekonomi, latar belakang budaya, etnik, ras, maupun kepegangan agama. Kenyataan ini pada satu segi mendorong interaksi, kooperasi, akomodasi, dan akulturasi antara berbagai kelompok masyarakat yang pluralistik itu, tetapi pada segi lain dapat menimbulkan ketegangan bahkan konflik antara satu sama

---

\* Penulis adalah dosen pada Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya.

lain, karena masing-masing kelompok pada waktu yang sama juga akan berusaha mempertahankan identitasnya, termasuk pandangan ideologisnya tentang agama.

Dalam kehidupan manusia terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Perbedaan ini menunjukkan pola perkembangan yang dipengaruhi oleh gejala-gejala dan masalah-masalah khusus, berkenaan situasi geografis, ekonomis, dan politis. Sebagai akibat adanya perbedaan ini bisa menimbulkan terjadinya pergolakan dan perubahan struktur masyarakat yang menyangkut perubahan kedudukan golongan-golongan sosial yang mempunyai peranan dan kekuasaan dalam menentukan arah dari gerak perubahan-perubahan tersebut. Dari situasi seperti ini dapat diamati dan dipahami adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menciptakan golongan sosial terkemuka (elite), serta kegiatan golongan sosial tersebut dalam menjalankan perubahan-perubahan masyarakat menjadi bangsa modern.

Perubahan masyarakat tradisional ke arah modern akan menimbulkan peran serta fungsi dari lembaga-lembaga lama ke baru. Ada golongan yang mempertahankan status lama dan

memandang perubahan sebagai ancaman, di lain pihak terdapat golongan elite baru yang melancarkan pembaharuan-pembaharuan, sehingga melahirkan pergeseran. Pergeseran-pergeseran tersebut melahirkan sejumlah teori pelapisan sosial (*social stratification*), ada yang menganggap sebagai sesuatu yang wajar, fungsional dan sebagainya. Tetapi pada hakekatnya pelapisan sosial mengacu kepada urutan dan tatanan yang hierarkhis seperti tinggi rendahnya, unggul-biasa, superior, inferior, priyayi-wong cilik, bangsawan-rakyat jelata, atasan-bawahan, santri abangan dan sebagainya.

Perbedaan ini menurut Noor (1999:216) mencerminkan pola masyarakat (*social structure*) yaitu masyarakat mengatur kedudukan dan peranan pelaku sosial sesuai dengan pola-pola yang diatur dan diterapkan. Aristoteles seorang filosof Yunani pernah mengatakan bahwa masyarakat di dalam suatu negara terbagi dalam tiga kelompok yaitu: kelompok yang kaya, kelompok miskin dan kelompok yang berada di tengah-tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak jaman dulu pun orang mengakui adanya kedudukan yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Oleh sebab itu, barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga,

seperti kedudukan, pangkat, jabatan dan juga kehormatan, mereka ditempatkan sebagai golongan yang berada pada lapisan atas dan mereka yang hanya sedikit memiliki atau bahkan tidak memiliki sesuatu yang dianggap berharga digolongkan sebagai golongan yang rendah. Bagaimana proses munculnya pelapisan sosial dan konflik itu terjadi, merupakan topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam tulisan ini akan mencoba menggambarkan pada tataran teoritik bagaimana konflik sosial dan dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang pluralistik.

### **B. Pelapisan Sosial**

Masyarakat terbentuk dari individu-individu yang memiliki berbagai latar belakang sehingga membentuk suatu masyarakat *heterogen* yang terdiri atas kelompok-kelompok sosial. Dengan terjadinya kelompok sosial ini, terbentuklah suatu pelapisan masyarakat.

Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan stabil dengan sendirinya masyarakat merupakan kesatuan yang dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama. Gejala-gejala yang sama dimaksud adalah adanya

perubahan sosial yang nantinya mengarah kepada ketidaksamaan sosial.

Ketidaksamaan sosial berkenaan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau pretise sosial antar individu dalam suatu masyarakat dinamakan pelapisan masyarakat atau stratifikasi masyarakat.

Menurut Sanderson, (1993: 145) bahwa ada dua segi penting dalam definisi ketidaksamaan sosial yaitu: *Pertama*, ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan antar individu dalam pengaruh sosial, yakni aksi seorang individu akan diikuti atau ditiru oleh individu lainnya, atau pretise, yakni dimana individu dihormati dan dihargai. Jadi ketidaksamaan ada dan dapat terjadi dalam masyarakat tanpa perbedaan kekayaan atau pendapatan individu atau kelompok. *Kedua*, ketidaksamaan sosial mengimplikasikan ketidaksamaan antar individu, bukan antar suatu kelompok-kelompok yang berlainan. Apabila terjadi ketidaksamaan, individu mencapai kedudukan tertentu yang berbeda, tetapi mereka tetap sebagai individu bukan sebagai kelompok.

Jadi dapat dipahami bahwa stratifikasi sosial adalah hal yang universal dalam masyarakat manusia, karena itu tidak ada

masyarakat tanpa perbedaan antar individu.

Berlawanan dengan ketidak-samaan sosial, stratifikasi sosial berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat (*ranked groups*) dalam satu masyarakat tertentu, yang anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise yang tidak sama pula. Konsep tentang stratifikasi ini dipengaruhi oleh konsep masyarakat terstratifikasi yang dikembangkan oleh antropolog Morton Fried (1967:186) yang menurutnya bahwa masyarakat ter-stratifikasi adalah masyarakat dimana anggota-anggota yang sama jenis kelamin dan umurnya tidak mendapat pendapatan atau penghasilan yang sama.

Dari definisi Fried di atas tertuang adanya perbedaan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Hal ini jelas melampaui fakta ketidaksamaan dalam pengaruh, kekuasaan, dan hak-hak istimewa. Kekuasaan meliputi kapasitas beberapa individu untuk memerintah individu lainnya. Hak-hak istimewa berkenaan dengan kekayaan dan keuntungan material lainnya. Perbedaan dalam hak-hak istimewa juga merupakan bagian dari sistem stratifikasi, dan biasanya dalam masyarakat ter-stratifikasi ketidaksamaan prestise

berasal dari ketidaksamaan kekuasaan dan hak-hak istimewa.

Karakteristik penting dari stratifikasi adalah bahwa ia melibatkan kelompok, bukan individu. Tingkat kekuasaan, hak istimewa dan prestise individu dalam masyarakat terstratifikasi tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya. Kelompok-kelompok yang tingkatannya berbeda-beda membentuk strata sosial atau lapisan sistem sosial-kultural secara turun-temurun, karena itu dalam masyarakat terstratifikasi individu dilahirkan dalam suatu stratum sosial tertentu yang memberikan suatu kedudukan sosial dan identitas tanpa memperhatikan karakteristik personal mereka.

Menurut Berger (1985:112) dalam pandangan sosiologis, cara menempatkan individu atau suatu kelompok dalam suatu kelas tertentu sangat bervariasi. Menggunakan latar belakang yang bermacam-macam, dengan kriteria yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ia mengemukakan ada 3 imbalan utama yang menentukan dalam stratifikasi sosial, yaitu : kekuasaan, privelese, dan prestise, yang berada pada simpang yang berbeda dalam sistem stratifikasi yang berbeda.

Kekuasaan diwujudkan dalam berbagai bentuk, politik, manajemen birokratik, macam-macam pendekatan pengawasan dan kontrol, penekanan dalam berbagai bentuk lainnya adalah tangan-tangan halus dari kekuasaan. *Privelese* (hak-hak istimewa) yang diperoleh oleh lapisan sosial tertentu tampak dengan berbagai kemudahan yang diperolehnya, sedangkan prestise sebagai pencerminan harga diri yang tinggi ditampilkan dengan gaya hidup yang sesuai dengan tingkatan sosial dimana ia berada.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut dan adanya kesenjangan pola sikap, tata nilai dan norma serta tingkah laku kelompok “superior” dengan kelompok “inferior” maka pelapisan sosial secara sosiologis merupakan masalah tersendiri. Di samping itu juga nilai bertentangan dengan hakekat dan cita-cita humanisme universal. Dengan cara pandang demikian, dapat menggugah individu untuk berusaha memperluas jaringan interaksinya dan berusaha untuk berusaha meningkatkan kualitas individu untuk mencapai kesamaan derajat sebagai cita-cita dan hakekat kemanusiaan.

Kenyataan mentalitas dan struktural yang eksklusif bagi kelompok “superior” dan “inferior” itu disebabkan karena

terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dengan kenyataan yang dihadapi. Oleh Soekanto (1983: 46) kesenjangan antara nilai dan norma dengan kenyataan yang dihadapi dikatakan sebagai salah satu sebab terjadinya masalah sosial.

Apa yang dikemukakan di atas merupakan kenyataan struktural dari pelapisan sosial, sehingga pelapisan sosial dalam masyarakat dapat dirasakan dalam kenyataan struktural sebagai berikut :

1. Masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki starta tertentu.
2. Strata itu terbentuk berdasarkan latar belakang kemajuan kebudayaan yang diaktualisasi-kan dalam bentuk kualitas individu dan kelompok.
3. Karena adanya strata itu maka lahirlah kelompok-kelompok yang dipandang sebagai kelompok inferior dan kelompok superior, berdasarkan suatu sistem aktual kedudukan dalam kerangka evaluasi moral.
4. Adanya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh kelompok superior sangat jelas dalam suatu sistem sosial, yang diikuti dengan

adanya lembaga-lembaga sosial birokrasi.

### C. Terjadinya Pelapisan Sosial

Dalam satu kelompok yang paling sederhana pun mengenal adanya pelapisan sosial. Bentuk yang paling sederhana diwujudkan dengan adanya orang-orang tertentu yang dianggap tua dan disegani dalam suatu kelompok. Pelapisan sosial ini merupakan salah satu hasil interaksi antar individu dalam satu kelompok maupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam interaksi tersebut seorang individu akan hadir dengan dua sisi kehidupannya, yaitu segi kehidupan pribadinya dan segi kehidupan bermasyarakat atau *public life*-nya. Berdasarkan kedua segi kehidupan individu ini, seseorang akan menilai situasi interaksi yang dijalkannya. Dalam proses itu individu akan menilai proses interaksi maupun situasi yang melingkupinya dengan interpretasi dan konsep pribadi dan berdasarkan penilaian masyarakat berdasarkan latar belakang kebudayaan. Dengan pemahaman tentang situasi interaksi atau *public life* maka seseorang akan dapat menempatkan diri dengan tepat dalam masyarakat atau dalam suatu sistem secara subyektif dan masyarakat akan lebih tepat

menempatkan individu secara obyektif. Hal ini akan menimbulkan rasa interdependensi antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakat. Seorang yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu yang mampu diaktualisasikan dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat akan menempatkan individu tersebut pada posisi tertentu. Demikian pula orang yang memiliki tingkat perekonomian tertentu, usia tertentu dan sebagainya. Kesadaran akan adanya hubungan interdependensi ini merupakan bibit dari pelapisan sosial. Bibit pelapisan sosial itu akan menjadi semakin melembaga apabila proses interaksi menjadi semakin intens, permasalahan semakin kompleks dan masyarakat semakin luas dan heterogen, sehingga pembagian pekerjaan semakin banyak. Karena pelapisan sosial terjadi karena makin meluasnya masyarakat dan makin banyaknya terjadi spesialisasi dan deversifikasi pekerjaan. (Koentjara-ningrat, 1980:174).

Parson (1985:72) menyatakan bahwa adanya spesialisasi dan diversifikasi pekerjaan ini menyebabkan timbulnya kecenderungan untuk menilai suatu pekerjaan serta orang-orang yang menekuni pekerjaan tersebut.

Menilai mana yang termasuk pekerjaan yang memenuhi kepentingan masyarakat dan sekaligus menempatkan pribadi yang mengemban tugas itu dalam satu kelompok "superior". Seraca empirik kelompok "superior" ini didasarkan atas suatu kualitas sikap mengenai "kehormatan" berdasarkan analisa atau evaluasi moral dari *public life* sesuai dengan latar belakang kebudayaannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa suatu pelapisan sosial pada prinsipnya ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri yang disusun berdasarkan evaluasi moral dengan menggunakan tata nilai dan norma secara obyektif oleh masyarakat pendukung suatu kebudayaan tertentu. Dengan kata lain dapat dikatakan terjadinya pelapisan sosial terjadi dengan sendirinya dan terjadi dengan disengaja.

Terjadinya pelapisan sosial yang tanpa sengaja adalah proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan, melainkan secara alamiah. Pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya, sehingga kedudukan seseorang secara

otomatis berada pada strata atau pelapisan, misalkan karena usia tua, pemilikan kepandaian yang lebih, kyai, ustadz, orang yang dianggap sakti dan sebagainya.

Sedangkan pelapisan yang terjadi dengan sengaja adalah sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas mengenai adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan ini maka di dalam organisasi itu terdapat keteraturan sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letak kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dan dalam suatu organisasi, baik secara vertikal maupun secara horisontal. Sistem pelapisan yang dibentuk secara sengaja ini dapat dilihat misalnya dalam organisasi pemerintahan, organisasi partai politik, LSM, perkumpulan-perkumpulan. (Mawardi, 2002:248).

#### **D. Konflik Sosial dalam Masyarakat Pluralistik**

Dalam Jurnal Dinamika Masyarakat (2002:1) dinyatakan bahwa konflik sosial adalah suatu keadaan dimana sekelompok orang dengan identitas yang jelas,

terlibat pertentangan secara sadar dengan satu kelompok lain atau lebih, karena mengejar tujuan-tujuan yang bertentangan, baik dalam nilai maupun dalam klim terhadap status, kekuasaan, atau sumber-sumber daya yang terbatas dan dalam prosesnya ditandai oleh adanya upaya pihak-pihak yang terlibat untuk saling menetralisasi, mencederai atau bahkan meng-eliminasi posisi eksistensi lawan. Jadi konflik sosial bukanlah kompetisi atau ketegangan, meskipun keduanya dapat menjadi cikal bakal konflik.

Robetsron seorang sosiolog sebagaimana dikutip Mudzar dalam Isre (ed. 2003:2) menyatakan ada dua teori besar yang menyebabkan manusia di dunia ini dapat bertahan dan terus berkembang dari generasi ke generasi dan tidak musnah, yaitu :

*Pertama*, dikatakan bahwa masyarakat manusia tetap bertahan karen para anggotanya bersepakat mengenai berbagai macam hal, termasuk berbagai macam nilai. Masyarakat manusia bersepakat untuk tidak saling membunuh misalnya dan bagi pelanggarannya harus diberikan sanksi tertentu. Masyarakat juga bersepakat untuk memegang dan menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu seperti kejujuran, kebenaran dan lain-lain. Akibat kesepakatan-kesepakatan itu maka

masyarakat yang majemuk dapat terpelihara keutuhannya karena selalu rukun dan tenteram serta dalam waktu yang sama terjadi pembagian tugas dan fungsi diantara sesama anggotanya untuk menopang tugas dan fungsi masyarakat itu secara keseluruhan. Teori ini sering disebut teori konsesus.

*Kedua*, dikatakan bahwa masyarakat manusia ini dapat tetap bertahan karena para anggotanya selalu terlibat dalam konflik satu sama lain sebagai inti eksistensi dari setiap satuan masyarakat. Akibat konflik-konflik itu maka muncullah bentuk-bentuk hubungan baru sebagai sintesa, jadi masyarakat manusia bertahan pada dasarnya adalah karena adanya tumpukan sintesa-sintesa itu. Mungkin muncul pertanyaan, apakah ini berarti masyarakat manusia itu tidak pernah rukun? Jawaban teori ini adalah bahwa masyarakat manusia memang bisa rukun, tetapi hal itu terjadi bukan karena adanya konsesus diantara para anggotanya melainkan karena adanya unsur "*coersion*" (pemaksaan) di dalam-nya, sehingga kelompok yang lebih kuat memaksa kelompok yang lebih lemah. Kemudian ketika pemaksaan itu diterima atau tidak ada perlawanan karena ketidakberdayaan pihak yang



dipaksa, dan hal itu berlangsung untuk jangka waktu tertentu, maka itulah yang disebut bahwa masyarakat itu sedang rukun.

Kedua teori di atas mengandung kebenaran tetapi tidak mampu menjelaskan kenyataan sosial secara menyeluruh, karena nyatanya dalam masyarakat yang plural masih sering terjadi konflik.

Pertentangan atau konflik sosial jika ditinjau secara psikologis dapat dikatakan sebagai refleksi dari kondisi psikis manusia dalam kerangka interaksi sosialnya. Struktur energi psikis manusia yang terdiri atas : ego dan super ego merupakan proses dinamik individu. Dalam proses tersebut sering terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan ego dengan norma-norma yang dipegang oleh super ego. Ego sebagai lembaga yang bekerja untuk mencapai tujuan berada pada garis persimpangan antara keinginan untuk secepatnya tercapai dengan kekuatan super ego yang selalu mempertimbangkan norma dan nilai dalam usaha mencapai tujuan ego. Interaksi antara individu dalam kelompoknya mempertemukan berbagai macam ego dan berbagai pertimbangan super ego dan tentu saja hal ini menyebabkan pentingnya pelem-bagaan ego dan super ego tersebut dalam suatu

proses integrasi. (Noor, 1999:222).

Untuk memahami masalah ini, penulis mengajak untuk beranalog pada distribusi energi psikis yang telah diungkapkan di atas. Dalam hal ini ego diwakili oleh adanya harapan-harapan dan super ego diwakili oleh adanya standar normatif. Pertentangan antara harapan dan standar normatif ini dapat terjadi di mana-mana, baik dalam kelompok kecil maupun besar baik dalam suatu status sosial maupun antar kelas sosial.

Dalam mengkomunikasikan harapannya kelompok yang berkepentingan dihadapkan pada kekuatan norma dan tata nilai masyarakat yang secara konsesual diterima sebagai nilai universal. Antara komunikasi harapan dengan standar normatif tidak selalu sejalan, sehingga komunikasi harapan ini masih harus melalui proses pertimbangan super ego. Ketidaksesuaian pandangan antara kedua kekuatan tersebut menimbulkan suatu sikap yang bertentangan yang diwujudkan dengan kesalahpahaman di antara keduanya. Pada tahap ini akan lahirlah yang dikatakan dengan pernyataan konflik baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk-bentuk langsung dalam berbagai aksi.

Dalam menghadapi standar normatif ini kelompok yang berkepentingan akan selalu berusaha membentangkan tujuan-tujuannya atau harapan-harapannya di atas tebaran tata nilai yang dijadikan standar dengan berusaha mengadakan rasionalisasi. Dalam hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik dalam bentuk perdebatan. Bentuk lain yang lebih ekstrim dari konflik ini adalah penyimpangan tingkah laku yang diaktualisasikan secara domon-stratif maupun tingkah laku yang bersifat mediator. Rasionalisasi yang dilancarkan oleh pihak ego dimaksudkan untuk mencapai interpretasi moralitas yang relevan yang memungkinkan masing-masing pihak mewujudkan kehendaknya. Rasionalisasi yang sering memperuncing konflik dipengaruhi pula oleh proses sosialisasi individu di mana hubungan manusia dengan norma-norma telah berubah sehingga ia merasa benar-benar harus berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan. Disinilah puncak dari suatu konflik. (Rex, 1985:14).

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada awalnya konflik dalam masyarakat plural dimulai dengan per-tentangan yang bersifat ideologis dan kemungkinan akan berakhir pada saat salah satu

pihak memaksakan pengertian mereka tentang moral maupun suatu harapan yang diikuti dengan kesadaran bahwa salah satu di antaranya telah berbuat kekeliruan.

Menurut Alfian, ideologi dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan. (Noor, 1999:223).

Pengertian di atas akan mengarah kepada kenyataan adanya berbagai kelompok sosial yang akhirnya akan menyebabkan lahirnya berbagai kepentingan yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda pula. Analisa konflik dari segi ideologis ini akan mengarahkan pembicaraan tentang konflik politik yang disebabkan karena adanya benturan kepentingan antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat yang pluralis.

Di samping tinjauan dimensi psikologis, ideologis dan perbedaan kepentingan seperti diuraikan di atas, masih ada cara memandang masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial. Tinjauan ini lebih bersifat

horizontal yaitu dengan menilai pola hubungan dan cara pandang antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya, kemungkinan hal ini bisa terjadi yaitu ketertutupan dan fanatisme antara kelompok sosial. Misalnya kelompok yang satu merasa curiga dan memberikan gambaran negatif terhadap kelompok yang lainnya. Demikian pula fanatisme pada kelompok menimbulkan perasaan super dan memandang kelompok lain lebih rendah. Keterikatan kelompok etnis pada *referens group* etnisnya menyebabkan kelompok etnis tersebut mengabaikan kelompok etnis lainnya. Kenyataan seperti ini juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok sosial dalam masyarakat yang pluralis.

#### E. Penutup

Dari paparan tentang konflik sosial dalam masyarakat pluralistik di atas, maka dapatlah penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dalam kehidupan manusia, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, atau tingkatan-tingkatan yang berbeda, sehingga membentuk suatu masyarakat *heterogen* yang terdiri atas kelompok-kelompok sosial. Dengan terjadinya kelompok sosial ini, terbentuklah suatu

pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial.

2. Pelapisan sosial pada prinsipnya ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri disengaja atau tidak disengaja yang disusun berdasarkan evaluasi moral dengan menggunakan tata nilai dan norma secara obyektif oleh masyarakat pendukung suatu kebudayaan tertentu.
3. Dalam mengkomunikasikan harapannya, kelompok yang berkepentingan dihadapkan pada kekuatan norma dan tata nilai masyarakat yang secara konsesual diterima sebagai nilai universal. Antara komunikasi harapan dengan standar normatif tidak selalu sejalan, sehingga ketidaksesuaian pandangan antara kedua kekuatan tersebut menimbulkan suatu sikap yang bertentangan yang diwujudkan dengan kesalahpahaman di antara keduanya. Pada tahap ini akan lahir lah yang di-katakan dengan pernyataan konflik baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk-bentuk langsung dalam berbagai aksi.
4. Konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat pluralistik diantaranya ditimbulkan dari akibat-akibat : (a) prasangka yaitu merasa curiga

dan memberikan gambaran negatif terhadap kelompok yang lainnya, (b) fanatisme pada kelompok menimbulkan perasaan super dan memandang kelompok lain

lebih rendah, dan (c) keterikatan kelompok etnis pada etnisnya menyebabkan kelompok etnis tersebut mengabaikan kelompok etnis lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, *Pemikiran dan Pembaruan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1980
- Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, Pustaka Sejati, Bandung, 1999
- Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986
- John Rex, *Analisa Sistem Sosial*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Jurnal Dinamika Masyarakat Vol. 1 No. 1 *Memahami Konflik Sebuah Pintu Masuk*, Jakarta, 2002
- Kaare Svalastoga, *Diferensiasi Sosial*, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Koendjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Bandung, 1980
- Mawardi dan Nur Hidayani, *IAD - ISD - IBD*, Pustaka Setia, Bandung, 2002
- Moh. Soleh Isre, (ed.) *Konflik etno Religius Indonesia Kontemporer*, Depag RI, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta, 2003
- Morton Fried, *The evolution of Political Society*, New York, Randon House, 1967
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1989
- Peter L. Berger, *Humanisme Sosiologi*, Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1985

Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1983

Talcot Parson, *Esei-esei Sosiologi*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985